



EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan kasih sayang-Nya maka Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselesaikan. Evaluasi RPJPD dilakukan dengan maksud untuk mengukur capaian kinerja pelaksanaan RPJPD terhadap empat periode RPJMD. Evaluasi ini merupakan evaluasi tahap akhir pelaksanaan RPJPD yang akan berakhir dalam 2 tahun yang akan datang. Pelaksanaan RPJPD berakhir bersamaan dengan berakhirnya implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan tahap IV.

Secara substansi, bahwa pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam dokumen ini merupakan hasil evaluasi dan refleksi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan selama 20 (dua puluh) tahun berjalan, dengan tolok ukur kinerja berdasarkan pencapaian Visi Misi dan Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025.

Dengan selesainya dokumen evaluasi RPJPD ini, diharapkan akan dapat menjadi pedoman dalam penyiapan RPJPD tahap berikutnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyusun rencana pembangunan daerah dua puluh tahun yang akan datang. Saran dan kritik membangun demi kesempurnaan hasil evaluasi dan melengkapi bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJPD kedepan sangatlah diharapkan.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan terlibat dalam proses penyusunan dokumen evaluasi ini diucapkan terima kasih atas bantuannya. Semoga dokumen ini bermanfaat dalam merencanakan kemajuan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan di masa datang.

Painan, Mei 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Tujuan	I-3
1.3. Dasar Hukum	I-3
1.4. Sistematika	I-4
 BAB II. CAPAIAN KINERJA RPJPD PADA AKHIR PERIODE	
2.1. Evaluasi Dokumn RPJPD 2005-2025.....	II-1
2.2. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RPJPD 2005-2025.....	II-3
2.2.1. Evaluasi Kuantitatif Pencapaian Kinerja pelaksanaan RPJPD 2005-2025 Pada Setiap Pentahapan.....	II-21
2.2.2. Capaian Indikator Makro Pembangunan Jangka Panjang.....	II-37
2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	II-38
2.2.2.2 Tingkat Kemiskinan.....	II-41
2.2.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-45
2.2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi.....	II-46
2.2.2.5 Pendapatan Perkapita.....	II-47
2.2.2.6 Ketimpangan Pendapatan.....	II-48
 BAB III. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA	
3.1. Faktor-Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja sasaran Pokok RPJP.....	III-3
3.2. Faktor-Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja sasaran Pokok RPJP	III-4

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan..... IV-1

4.2. Rekomendasi.....IV-1

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1. Evaluasi Dokumen RPJPD berdasarkan Kesesuaian Materi dengan RTRW dan Visi Misi Pembangunan 2005 – 2025 Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-1
2.2. Analisis Arah dan Pentahapan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025.....	II-5
2.3. Evaluasi Pencapaian RPJMD Tahun 2006-2010 Kabupaten Pesisir Selatan	II-22
2.4. Evaluasi Pencapaian RPJMD Tahun 2010-2015 Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-25
2.5. Evaluasi Pencapaian RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Pesisir Selatan	II-28
2.6. Evaluasi Pencapaian RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan	II-31
2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kab. Pesisir Selatan, 2021-2022.....	II-46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Sistematika Keterkaitan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025	II-4
2.2. Indek Pembangunan Manusia Kab. Pesisir Selatan, 2005-2022	II-38
2.3. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kab. Pesisir Selatan, 2010-2022.....	II-39
2.4. Perkembangan Umur Harapan Hidup Kab. Pesisir Selatan, 2010-2022.....	II-40
2.4. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan Selama 2010-2022.....	II-40
2.6. Tingkat Kemiskinan Kab. Pesisir Selatan, 2005-2022.....	II-42
2.7. Pertumbuhan Garis Kemiskinan dan perkembangan Inflasi Kab. Pesisir Selatan, 2005-2022	I-43
2.8. Pertumbuhan Indeks P1 dan P2 Kab. Pesisir Selatan, 2005-2022.....	II-44
2.9. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Pesisir Selatan, 2006-2022	II-45
2.10. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pesisir Selatan, 2005-2022.....	II-47
2.11. Perkembangan Pendapatan Perkapita Kab. Pesisir Selatan, 2005-2022.....	II-48
2.12. Perkembangan Gini Ratio Kab. Pesisir Selatan, 2005-2022.....	II-49
2.12. Perkembangan Gini Ratio Kab. Pesisir Selatan, 2005-2022.....	II-49
3.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kab. Pesisir Selatan, 2005-2022.....	III-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagaimana dalam Pasal 248 mengamanatkan bahwa evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya evaluasi terhadap RPJP Kabupaten/Kota dilakukan setiap lima tahun sekali untuk menjaga agar tetap mencapai tujuannya. Evaluasi RPJPD yang merekomendasikan perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan sebelum 7 tahun RPJPD akan berakhir. Evaluasi yang dilakukan pada periode akhir RPJPD yaitu pada saat pelaksanaan RPJMD periode ke empat, maka tujuannya tentu bukan lagi untuk tindakan perbaikan dan perubahan RPJPD melainkan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya. Hasil evaluasi RPJPD kabupaten dilaporkan oleh kepada Bappeda kepada Bupati, dan selanjutnya diteruskan kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi.

Selain itu, evaluasi juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten telah berkontribusi dan dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang, maka ditetapkan tahapan lima tahunan (empat RPJMD). Empat tahapan RPJMD yang dimaksud berhirarki agar

setiap tahapan menjadi prasyarat untuk mencapai tahap yang lebih tinggi, sampai visi terwujud pada tahap IV RPJMD selama periode 20 tahun jangka panjang.

Urgensi evaluasi RPJPD adalah untuk melihat kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), kejelasan arah pembangunan dan mengukur keberhasilan upaya-upaya untuk mewujudkan misi. Hasil evaluasi RPJPD ini diutamakan untuk pedoman dan pertimbangan dalam penyusunan RPJPD berikutnya.

Saat ini Kabupaten Pesisir Selatan melakukan evaluasi RPJPD berada dalam 3 tahun akan berakhirnya periode RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025. Tata cara evaluasi RPJPD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 251, bahwa evaluasi dilakukan mencakup sasaran pokok, arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Namun dokumen RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan periode 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005-2025, disusun sampai pada arah kebijakan belum sampai ke sasaran pokok, dan masih bersifat kualitatif. Tentu saja kondisi ini agak terkendala pada saat melakukan evaluasi RPJPD. Berkenaan dengan kendala tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 600.2.1/1570/SJ tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, menyatakan bahwa dalam hal Perda RPJPD masih memiliki sasaran pokok bersifat kualitatif, maka evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD dengan mengubah target sasaran pokok pada tiap periode/tahapan dan atau/atau arah kebijakan yang masih bersifat kualitatif tersebut menjadi data kuantitatif ke dalam indikator yang relevan.

Berdasarkan pedoman Edaran Mendagri, maka evaluasi RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025 dilakukan sesuai arahan tersebut. Berbagai dokumen laporan dibedah, diteliti, dianalisis bahkan membandingkan materi antar dokumen dan lain-lainnya. Diantaranya dokumen yang dihimpun adalah Perda RPJPD Kab, Pesisir Selatan 2005-2025, Perda RPJMD 4 periode Kabupaten Pesisir Selatan, Laporan evaluasi RPJMD, LPPD

(Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah), Laporan Kinerja, publikasi BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, Sumatera Barat dalam Angka, dan berbagai sumber resmi lainnya, Hal demikian ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi substansi evaluasi kinerja RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025.

1.2. Tujuan

Tujuan dari evaluasi RPJPD ini adalah :

- a. Menganalisis kinerja RPJPD periode 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Menyediakan informasi untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan periode berikutnya.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan evaluasi RPJPD ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025.
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika

Sistematika Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan latar belakang penyusunan dokumen evaluasi RPJPD, tujuan dan dasar hukum penyusunan serta sistematika dokumen.

BAB II : Capaian Kinerja RPJPD Pada Akhir Periode

Menyajikan tentang analisis capaian kinerja RPJPD berdasarkan pelaksanaan RPJPD pada akhir periode beserta capaian indikator makro pembangunan.

BAB III : Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Memuat hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD.

BAB IV : Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Memuat kesimpulan terhadap hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD, sebagai rekomendasi untuk penyusunan RPJPD periode berikutnya..

BAB II

CAPAIAN KINERJA RPJPD PADA AKHIR PERIODE

2.1. Evaluasi Dokumen RPJPD 2005-2025

RPJPD 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025. Namun tidak ditemukan penjelasan di dalam dokumen mengapa RPJPD yang disusun dan efektif digunakan mulai tahun 2005 tetapi disahkan dengan peraturan daerah pada tahun 2010.

Evaluasi RPJPD dimulai dengan melakukan review terhadap dokumen RPJPD berdasarkan kriteria kesesuaian RPJPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam hal pola ruang dan strukturnya, visi dan misi pembangunan yang ditetapkan.

Tabel 2.1. Evaluasi Dokumen RPJPD berdasarkan Kesesuaian Materi dengan RTRW dan Visi Misi Pembangunan 2005 – 2025 Kabupaten Pesisir Selatan

Fokus	Uraian	Indikator	Hasil Evaluasi
Kesesuaian dengan RTRW (penelaahan RTRW)	Arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan arah kebijakan RTRW	1. Struktur ruang 2. Pola ruang 3. Indikasi program pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none">• Secara umum perencanaan pembangunan jangka panjang menggunakan perencanaan berbasis spasial dalam merencanakan pembangunan fisik dan lingkungan, namun belum memuatnya dalam indikator yang terukur.• pembangunan kawasan dan pembangunan infrastruktur jalan yang tertuang dalam pembangunan jangka panjang belum didukung data dari RTRW• Secara eksplisit dinyatakan bahwa bahwa RPJPD terkait

Fokus	Uraian	Indikator	Hasil Evaluasi
			dengan RTRW, namun ditemukan pernyataan bahwa "keinginan untuk pemekaran kabupaten Pesisir Selatan menjadi 2 atau 3 kabupaten dapat dituangkan dalam konsep RTRW" (halaman 24). Artinya belum ada pedoman dari RTRW yang dirujuk RPJPD.
Visi	Arah pembangunan yang jelas "Pesisir Selatan Daerah Maju, Sejahtera Dengan Basis Ekonomi Pangan dan Pariwisata"	<ul style="list-style-type: none"> • Telah menjawab permasalahan pembangunan atau isu strategis • Mengakomodasi peluang dan kekuatan serta keunikan kompetitif daerah • Menggambarkan nilai kunci lokal (core values) 	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan pembangunan dan isu strategis belum didukung dengan data yang cukup bahwa secara spesifik pembangunan daerah Pesisir Selatan penting untuk diarahkan kepada kesejahteraan dengan berbasis pangan dan pariwisata. • Data pariwisata yang disajikan hanya data jumlah objek wisata, jumlah pengunjung.
Misi	Upaya-upaya yang jelas untuk mewujudkan visi	<ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan faktor, lingkungan strategis eksternal dan internal daerah • Bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah diingat 	Misi yang dituangkan cukup baik, walaupun didominasi faktor lingkungan internal daerah dan belum menunjukkan keinginan untuk menangkap peluang dan mengatasi tantangan faktor lingkungan eksternal

Dari susunan penyajian unsur dan materi RPJPD 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan, terlihat bahwa :

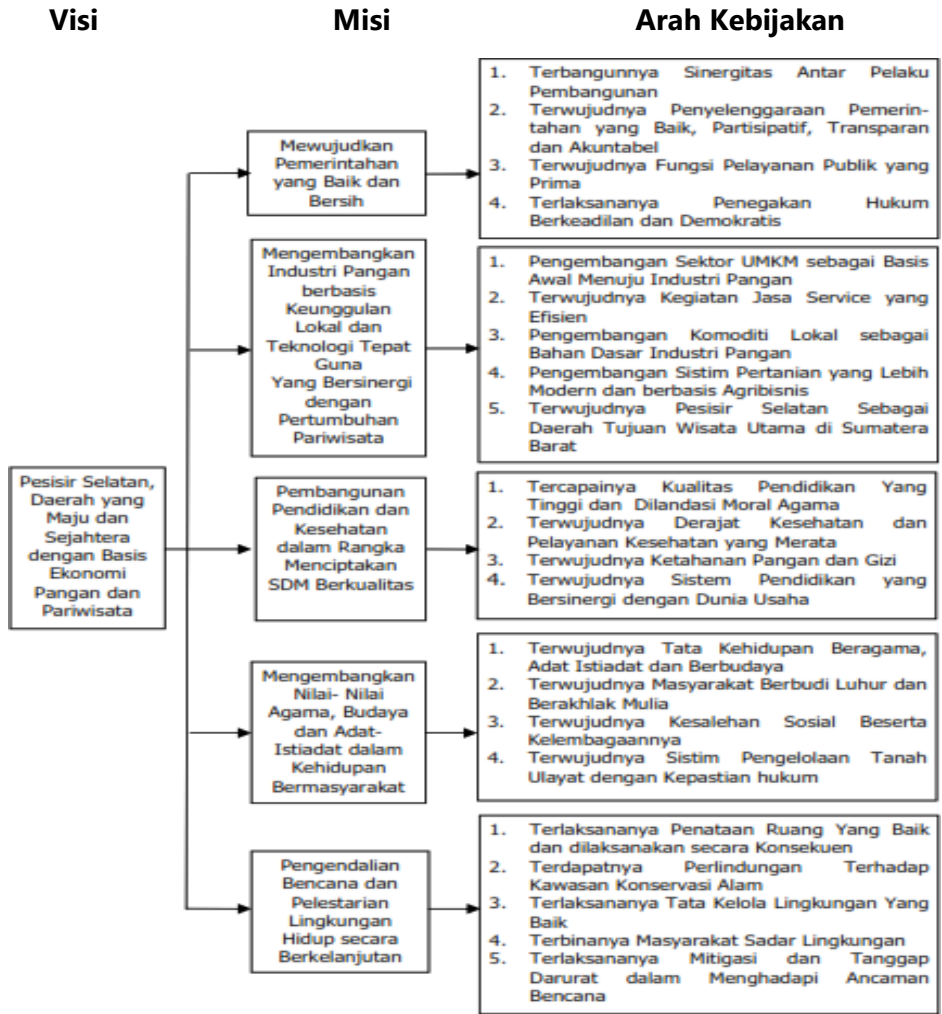
1. Semua unsur dan materi kelengkapan dokumen RPJPD, telah tertuang dan telah dipenuhi RPJPD ini. Namun demikian, belum semua unsur didukung data yang relevan dan isian materi untuk penetapan isu strategis dinilai masih dangkal karena belum didukung dengan penyajian data pada Bab II.
2. Indikator untuk menguji capaian target pembangunan di akhir tahun 2025 juga belum didukung dengan metoda analisis yang jelas.
3. Tidak ada penjabaran misi ke dalam sasaran pokok yang seharusnya diperlukan untuk menguji dan menjamin bahwa misi akan dapat dicapai.
4. Misi langsung diturunkan kepada arah kebijakan untuk setiap tahapan RPJMD. Perlu penjelasan mengapa RPJMD periode pertama tidak termasuk kedalam tabel tahapan RPJPD.

2.2. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RPJPD 2005-2025

Evaluasi kinerja pelaksanaan RPJP dimulai dengan menganalisis hubungan kinerja Misi dengan semua strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan untuk setiap tahapan RPJMD yang mengisi RPJPD. Namun karena yang disajikan dalam RPJPD ini hanya arah kebijakan, maka disajikan hasil evaluasi Misi terhadap Arah kebijakan RPJMD tahap 2, 3 dan 4. Lima Misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025 adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yang berorientasi pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan memperkuat industri pangan berbasis keunggulan lokal yang dalam perkembangannya bersinergi dengan pertumbuhan pariwisata daerah.
3. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas dalam rangka membangun sumberdaya insani yang memiliki daya saing tinggi.
4. Mengembangkan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat
5. Pengendalian bencana dan mempertahankan kelestarian lingkungan

Selanjutnya Misi tersebut diturunkan kepada arah kebijakan sebagaimana Gambar 3 yang menyajikan hubungan visi, misi, dan arah kebijakan RPJP Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005-2025.



Gambar 2.1. Sistematika keterkaitan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025

Misi RPJP dan arah kebijakan setiap tahap RPJMD selanjutnya sebagaimana disajikan dan dianalisis pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Analisis Arah dan Pentahapan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)	Analisis
	Era	Era persiapan pengembangan dan ekonomi pangan dan pariwisata	Era Menumbuh-kembangkan industri Pangan berbasis keunggulan lokal dengan strategi Proteksi Daerah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Era persiapan industri pangan lokal yang berdaya saing nasional	<ul style="list-style-type: none"> Era dibuat cukup konsisten, yakni sektor pangan dan industri pangan Namun Era belum memperlihatkan sekuensi yang bertahap. Era persiapan industri pangan diletakkan pada tahap akhir, sementara menumbuhkembangkan industri berada pada tahapan sebelumnya
A.	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yang berorientasi pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat				
1	Terbangunnya Sinergitas Antara pelaku	Terlaksananya keterpaduan program dan	Meningkatnya koordinasi pengelolaan	Mantapnya koordinasi pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Untuk terbangunnya sinergi antar pelaku pembangunan,

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)	Analisis
	Pembangunan	kegiatan antara SKPD yang telah ada	program antar SKPD	program SKPD	sekuensi pentahapan penting diperhatikan. • Koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan adalah prasyarat untuk terlaksananya keterpaduan program dan kemitraan
		Terbangunnya kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif	Meningkatnya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat	Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat	
		Terjalinnya kerjasama pembangunan dengan wilayah perbatasan	Meningkatnya koordinasi pembangunan dengan wilayah perbatasan	Meningkatnya kemitraan usaha di wilayah perbatasan	
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya organisasi restrukturisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Terwujudnya kualitas aparatur yang lebih profesional	Penerapan teknologi informasi dalam sistem birokrasi daerah	
		Terlaksananya	Terwujudnya	Memantapkan	

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)	Analisis
		reorganisasi birokrasi daerah sesuai kebijakan nasional	kualitas aparatur yang lebih profesional	penerapan Teknologi Informasi dalam sistem birokrasi	
		Terlaksananya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran partisipatif	Memantapkan peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan	
3	Terwujudnya Fungsi Pelayanan Publik yang Prima	Terwujudnya sistem pelayanan terpadu yang semakin efisien dan efektif	Terwujudnya sistem pelayanan terpadu yang terukur, tepat waktu, tepat biaya dan nyaman	Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan terpadu	Pelayanan Publik yang Prima akan terwujud apabila didukung dengan sistem informasi yang baik berbasis teknologi. Maka tahap pertama yakni terwujudnya sistem pelayanan terpadu yang semakin efisien dan efektif seharusnya adalah tahap akhir RPJP
		Penataan penempatan aparatur sesuai dengan	Melakukan pelatihan guna peningkatan kapasitas	Tersedianya aparatur pelayanan yang berkualitas	

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)	Analisis
		kebutuhan organisas	aparatur dalam pelayanan publik		
4	Terlaksananya Penegakan Hukum Berkeadilan dan Demokratis	Terlaksananya pembaharuan produk-produk hukum guna menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan pembangunan	Melakukan pembangunan struktur dan kelembagaan hukum daerah	Memantapkan sistem pemantau kerawanan konflik politik	Terlaksananya Penegakan Hukum Berkeadilan dan Demokratis, berbau hukum positif. Sementara yang diharapkan adalah hukum adat dapat diadopsi kedalam penegakan hukum untuk penyelesaian konflik di masyarakat. Sekuensinya tentu dimulai dari meningkatkan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa adat
		Terdapatnya transformasi budaya Minangkabau ke dalam produk hukum daerah	Melakukan pendidikan dasar hukum bagi fungsionaris adat	Meningkatkan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa adat	
B.	Mengembangkan dan memperkuat industri pangan berbasis keunggulan lokal yang dalam perkembangannya bersinergi dengan pertumbuhan pariwisata daerah				

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)	Analisis
1	Pengembangan Sektor UMKM sebagai Basis Menuju Industri Pangan	Penetapan desa dan pembinaan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal	Penumbuhan industri pangan pada desa-desa binaan	Pengembangan industri pangan secara lebih meluas	
		Penelitian dan pengembangan produk-produk olahan yang berpotensi dikembangkan dari sumberdaya lokal	Terciptanya produk olahan yang memiliki cita rasa yang berkualitas dan digemari oleh pasar dalam dan luar daerah	Mendorong sebagian pengusaha kecil berkembang menjadi pengusaha kelas menengah	
2	Terwujudnya Kegiatan Jasa Servis yang Efisien	Semakin berkembangnya manajemen usaha bisnis jasa yang telah ada	Meningkatnya kemampuan kewirausahaan yang bersifat profesional.	Terwujudnya kemampuan penggunaan teknologi informasi yang tinggi	Tahapan ini tidak menunjukkan tahapan yang satu dilakukan setelah yang tahapan sebelumnya selesai, melainkan satu tahapan yang akan mewujudkan berkembangnya usaha bisnis.
		Terlaksananya Penataan lokasi Pasar dan	Terselenggaranya sistem transportasi	Terwujudnya manajemen usaha jasa	Apabila kegiatan jasa servis efisien diharapkan mendukung dan

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)	Analisis
		pembangunan fasilitas terkait	daerah yang nyaman dan terintegrasi dengan kegiatan wisata	modern dan profesional	terintegrasi dengan wisata, maka yang dikembangkan adalah ekonomi kreatif bukan hanya bisnis jasa yang telah ada.
3	Pengembangan Komoditi Lokal sebagai bahan dasar Industri pangan	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas	20% produksi pertanian dalam arti luas yang dijual telah dilakukan pengolahan	30% produksi pertanian dalam arti luas yang dijual telah dilakukan pengolahan	
		Pembinaan terhadap petani dan nelayan dalam hal penggunaan teknologi tepat guna	Meningkatnya penguasaan teknologi tepat guna oleh petani dan nelayan	Berkembangnya penguasaan teknologi oleh petani dan nelayan secara lebih masif termasuk sistem informasi	
		Terbangunnya prasarana dan sarana penangkapan, pendaratan dan pendukung operasional	Terselesainya prasarana dan sarana penangkapan, pendaratan dan pendukung operasional	Terkembangkannya kelembagaan usaha/bisnis penangkapan dan budidaya ikan laut dengan	

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)	Analisis
		penangkapan	penangkapan	pola kemitraan pemerintah dan swasta dan intensifikasi penangkapan dan budidaya	
		Dihasilkannya SDM yg handal utk mendukung usaha penangkapan dan budidaya ikan laut	Berlanjutnya proses menghasilkan SDM yg handal utk mendukung usaha penangkapan dan budidaya ikan laut	Dihasilkannya SDM yang handal untuk mendukung usaha penangkapan dan budidaya ikan laut	Tahap 4 kembali mengulang tahap 2 yang seharusnya sudah selesai.
		Pembentukan dan pembinaan terhadap kelembagaan usaha bisnis perikanan	Berkembangnya kelembagaan usaha bisnis penangkapan dan budidaya ikan laut dengan pola kemitraan	Meningkatnya kemampuan kelembagaan usaha bisnis penangkapan dan budidaya ikan laut	Meningkatnya kemampuan kelembagaan seharusnya menjadi syarat untuk berkembangnya kelembagaan usaha bisnis
4	Pengembangan Sistem Pertanian yang Lebih Modern dan	Terlaksananya secara penuh penyuluhan dan bimbingan teknis	Meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha pertanian rakyat	Diterapkannya teknologi pertanian tepat guna pada	Pengembangan Sistem Pertanian yang Lebih Modern dan Berbasis

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)	Analisis
	Berbasis Agrobisnis	untuk usaha pertanian rakyat. secara merata.	melalui penyuluhan dan bimbingan teknis	kawasan-kawasan potensial	Agrobisnis perlu didukung dengan pengembangan agroindustri yang sekaligus akan berkontribusi pada pengembangan pariwisata sesuai era yang diharapkan
		Pembangunan kawasan strategis secara lebih terintegrasi	Terciptanya keterlibatan setiap sektor dalam pembangunan kawasan strategis	Terbangunnya 5 kawasan strategis dalam menopang perekonomian masyarakat Pesisir Selatan	
5	Terwujudnya Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama di Sumatera Barat	Pembangunan Kawasan Carocok Painan dan melengkapi prasarananya	Pembenahan kawasan pemukiman kawasan wisata Carocok Painan dan kawasan Mandeh	Pengembangan desa-desa wisata dalam rangka penumbuhan sadar wisata dan peningkatan keterlibatan masyarakat	
		Pembangunan Jalan: Alahan Panjang Pasar Baru Bayang; Jalan Carocok Tarusan-Sungai Pinang-Teluk Kabung	Pembenahan kawasan Mandeh dan Jembatan akar	Pengembangan kawasan wisata Mandeh Rubiah, Sumedang dan wisata budaya	

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)	Analisis
		Terbangunnya pusat informasi wisata lengkap dengan fasilitas teknologi informasi	Terdapatnya kualitas prasarana dan sarana perhubungan menuju objek wisata	Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga pemandu dan pengelola wisata	
C	Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas dalam rangka membangun sumberdaya insani yang memiliki daya saing tinggi				
1	Tercapainya Kualitas Pendidikan yang Tinggi dan Dilandasi Moral Agama	95 % guru berkompeten diseluruh jenjang pendidikan dan seluruh sekolah terakreditasi	berkompeten diseluruh jenjang pendidikan dan seluruh sekolah terakreditasi. Penyelesaian manajemen eksternal Tercapainya target MDG pemerataan SMP 99%	Mengupayakan pencapaian mutu sekolah bertaraf internasional	Untuk mewujudkan tercapainya Kualitas Pendidikan yang Tinggi dan Dilandasi Moral Agama, apakah benar harus dengan target terwujudnya sekolah dan sistem pendidikan bertaraf internasional? Perlu kajian untuk mendukung pemikiran ini.
		Tersedia Lab ilmu dasar: matematika, fisika, kimia dan biologi dan guru tersedia	u dasar: matematika, fisika, kimia dan biologi dan guru tersedia Kurikulum agama	Menyiapkan masyarakat untuk sistem pendidikan internasional	

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)	Analisis
			terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran		
		Selesainya Fokus Sekolah kejuruan	Terwujudnya Sekolah Kejuruan standar nasional		
		Studi Kelayakan Pembangunan Perguruan Tinggi Negeri	Koordinasi dengan lembaga terkait dalam pembangunan Perguruan Tinggi Negeri	Menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung	
		Rintisan 1 Sekolah Berasrama	Penumbuhan sekolah berstandar nasional disetiap kecamatan	Pemantapan 1 Sekolah berasrama dan 2 Standar Internasional	
2	Terwujudnya Derajat Kesehatan dan pelayanan kesehatan yang merata	Konsolidasi manajemen pelayanan kesehatan dasar	Penuntasan sebagian Penyakit utama	Konsolidasi manajemen pelayanan kesehatan Dasar	Tahap 4 merupakan pengulangan tahap 2 yang seharusnya sudah selesai
		Peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD M. Zein	Meningkatnya Status Rumah Sakit Tapan dari Tipe D menjadi	RSUD M. Zein Painan menjadi salah satu rumah sakit rujukan di	

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)	Analisis
		Painan dan meningkatkan statusnya menjadi rumahsakit Tipe B Tersedianya	RS tipe C	Sumatera Barat untuk perawatan kesehatan tertentu	
		rumah sakit Tipe D di Tapan			
3	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Gizi	Peningkatan jumlah dan diversifikasi tanaman pangan guna meningkatkan derajat kesehatan serta gizi masyarakat	Meningkatkan produksi melalui teknologi tepat guna secara maksimal	Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	Tahap 4, Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian tanaman pangan adalah berorientasi ekonomi, bukan kepada ketahanan pangan dan gizi.
4	Terwujudnya Sistem Pendidikan yang Bersinergi dengan Dunia Usah	Peningkatan infrastruktur pendidikan kejuruan yang berorientasi kepada dunia usaha	Mengoptimalkan fungsi balai latihan kerja dan penambahan balai latihan kerja di setiap kecamatan	Peningkatan kualitas tenaga edukasi dan tenaga non edukasi	
D.	Mengembangkan Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Adat Istiadat dalam Kehidupan Bermasyarakat				
1	Terwujudnya Tata kehidupan	Terlaksananya pencerahan	Terlaksananya pencerahan	Terlaksananya pencerahan	Tidak tampak perbedaan tahap 2, 3, dan 4.

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)	Analisis
	beragama, adat Istiadat dan berbudaya	pemahaman agama dan adat kepada para tokoh dan pemuka masyarakat	agama dan adat untuk mubaligh dan tokoh agama	agama dan adat untuk masyarakat umum	
		Semakin lengkapnya jumlah sarana peribadatan	Semakin meningkatnya kualitas sarana peribadatan	Semakin meningkatnya kualitas sarana peribadatan	
2	Terwujudnya Masyarakat Berbudhi Luhur dan Berakhlak Mulia	Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan	Meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama pada generasi muda	Meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama pada generasi muda	Tahap 4 merupakan pengulangan tahap 3
		Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi masyarakat	Tahap 2, 3 dan 4 persis sama
3	Terwujudnya Kesalehan Sosial Beserta Kelembagaannya	Semakin optimalnya pengumpulan dan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang	Terbangunnya wadah tunggal pengelola zakat, wakaf dan infak	Tahap 3 idealnya lebih dahulu untuk mewujudkan tahap 2.

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)	Analisis
		pemanfaatan, zakat, infak dan sadakah.	kesalehan sosial		
		Terlaksananya penerapan sistem perbankan syariah	Semakin mantapnya penerapan sistem perbankan syariah	Terlaksananya penerapan Sistem Ekonomi Islam	
4	Terwujudnya sistem pengelolaan tanah ulayat Dengan Kepastian Hukum	Terlaksananya inventarisasi dan konsolidasi pemilik ulayat	Terlaksananya kesepakatan KAN seluruh kabupaten dan kota tentang sistem pemanfaatan tanah ulayat	Terlaksananya pemanfaatan yang berlandaskan sistem yang telah diatur dalam Perda Tanah Ulayat	Tahap 2 tidak perlu mencakup kabupaten dan kota lain karena RPJP ini tidak mengatur kesepakatan antar kabupaten dan kota dan akan mengganggu kinerja pembangunan apabila tidak tercapai
		Terlaksananya pemetaan tanah ulayat berikut pemiliknya	Tersusunnya Perda Tanah Ulayat yang disepakati oleh KAN dan Lembaga Kerapatan Adat	Terlaksananya Pengamanan atas pemanfaatan tanah ulayat.	
E	Pengendalian bencana dan mempertahankan kelestarian lingkungan				
1	Terlaksananya	Selesainya	Terlaksananya	Semakin	Tahap 2 tidak dapat

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)	Analisis
	Panataan Ruang Yang Baik dan Dilaksanakan Secara Konsekuen	penyusunan RTRW Provinsi Sumbar serta kab dan kota lainnya	penerapan dokumen RTRW secara tegas dan konsekuen	mantapnya penataan ruang wilayah	dikontrol oleh kabupaten melalui RPJP ini, maka target tahap 3 dan 4 tidak mungkin tercapai sesuai yang direncanakan RPJP. Hal ini mengganggu kinerja pembangunan jangka panjang daerah
		Terlaksananya penyusunan Rencana Induk Sektoral sesuai prioritas pembangunan	Selesaiannya Penyusunan Rencana Induk Sektoral sesuai daerah	Terlaksananya revisi terhadap RTRW yang telah berjalan separuh waktu.	
		Tersusunnya Rencana Zonasi Ruang Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Tersusunnya Rencana Zonasi Rinci Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Penerapan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam Pembangunan	
2	Terdapatnya Perlindungan Terhadap Kawasan Konsevasi Alam	Terlaksananya penetapan patok yang jelas serta inventarisasi lahan flora dan fauna serta lahan	Terwujudnya peningkatan perlindungan dan pengawasan terhadap Kawasan	Terdapatnya pengembangan flora dan fauna dalam Kawasan Konservasi	

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)	Analisis
		Kritis	Konservasi Alam		
		Terlaksananya penertiban penebangan hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi	Terwujudnya penetapan Perda sanksi keras bagi pelanggaran Kawasan Konservasi Alam	Meningkatnya populasi tanaman langka	Tahap 2 dan 3 satu ide yang sama
3	Terlaksananya Tata Kelola Lingkungan Yang Baik	Terlaksananya pengembangan sarana dan manajemen lingkungan	Tersusunnya standar baku mutu air dan udara bagi industri	Terlaksananya pengawasan ketat terhadap pencemaran air dan udara oleh industri	
		Tersusunnya Perda lebih operasional untuk pengelolaan lingkungan hidup.	Terwujudnya pengawasan penggunaan lahan kritis	Terdapatnya pengawasan penggunaan lahan kritis	
4	Terbinanya Masyarakat Sadar Lingkungan	Berkembangnya pendidikan dan penyuluhan sadar lingkungan	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan sadar lingkungan	Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan sadar lingkungan	

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	RPJM Ke-2 (2011-2015)	RPJM Ke-3 (2016-2020)	RPJM Ke-4 (2021-2025)	Analisis
5	Terlaksananya Mitigasi dan Tanggap Darurat dalam menghadapi ancaman bencana	Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, seperti : - jalur evakuasi - pemecah gelombang (breakwater) - Shelter - dll	Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, seperti : - jalur evakuasi - pemecah gelombang (breakwater) - Shelter - dll	Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, seperti : -jalur evakuasi - pemecah gelombang (breakwater) - Shelter - dll	Tahapan pelaksanaan mitigasi bencana tentu tidak sama dari periode ke periode RPJMD, dapat ditingkatkan dengan metoda dan teknik mitigasi yang memperlihatkan peningkatan teknik mitigasi. Selain itu juga dapat ditargetkan dari sisi hasil implementasi mitigasi.

2.2.1. Evaluasi Kuantitatif Kinerja Pelaksanaan RPJPD 2005-2025 Pada Setiap Pentahapan

Sasaran dan arah kebijakan untuk mewujudkan Misi tidak diurai dengan tegas dan rinci di dalam setiap tahapan RPJMD, sehingga pencapaian sasaran tidak pula dapat diukur dengan jelas. Namun untuk tetap dapat mengukur capaian RPJPD maka digunakan analisis terhadap target dan realisasi sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJPD 2005-2025 dengan sebelas indikator utama berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) minimal 80
2. Pendapatan perkapita sekitar US \$ 5.000 dengan Indeks Gini Ratio paling tinggi 0,25
3. Terjadi transformasi mata pencaharian penduduk dari sektor primer ke sektor sekunder yang diikuti dengan meningkatnya kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 30%;
4. Lapangan kerja terbuka bagi generasi muda, sehingga angka pengangguran turun menjadi cukup rendah yakni 5 %;
5. Persentase penduduk miskin turun menjadi sangat rendah yakni 5,0 %
6. Pasar Kecamatan tumbuh menjadi pasar semi modern. Khususnya Pasar Tapan, Pasar Kambang, dan Pasar Baru diarahkan menjadi pasar grosir yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan jual beli secara langsung dengan konsumen maupun memenuhi kebutuhan barang eceran pasar kecamatan lainnya. Fungsi Kota Painan sebagai Pusat Kegiatan Lokal berkembang dengan mantap
7. Tumbuh sebuah kota modern di Silaut yang dicikalbakali oleh KTM
8. Ekonomi tumbuh secara lebih berkualitas dengan tingkat pertumbuhan di atas 7%, yang diikuti dengan distribusi pendapatan yang baik
9. Kemungkinan Pesisir Selatan mekar menjadi dua Kabupaten. Kecamatan Tapan yang telah di Plot dalam RTRW sebagai kawasan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) akan menjadi pusat pertumbuhan baru di wilayah bagian selatan Provinsi Sumatera Barat dan Pesisir Selatan. Painan sebagai Ibukota Kabupaten semakin mantap fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
10. Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang selesai, Carocok-Mandeh, Sungai Pinang dan Sungai Pisang selesai, Jalan Lintas Barat Indera Pura-Muara Sakai-Kota Silaut terbuka,

- dan Jalan Kambang-Muara Labuh dirintis;
11. Beberapa objek wisata tumbuh menjadi wisata utama di Sumatera Barat

1. Periode 2006 - 2010

Pada periode RPJMD 2006-2010, penyajian Tujuan dan Sasaran pembangunan tidak dituangkan per misi dan tidak ada indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan. Namun demikian dengan menggunakan analisis target dan realisasi RPJPD sebagaimana yang dijelaskan terdahulu, beberapa indikator kinerja yang menjadi parameter pencapaian pembangunan pada Misi dapat diidentifikasi berikut ini :

Tabel 2.3. Evaluasi Pencapaian RPJMD Tahun 2006-2010
Kabupaten Pesisir Selatan

Visi/Misi	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2006	Target Capaian pada Tahun 2010	Realisasi Akhir Periode (2010)	Tingkat Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PESISIR SELATAN YANG SEJAHTERA"						
Misi 1						
Menegakkan Supremasi Hukum dan HAM, menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat	Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	WTP	WDP	50%	Rendah
Misi 2						
Mengembangkan perekonomian lokal dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,53	> 7%	5,28%	75,43%	Sedang
	PDRB Perkapita (ADHK) (juta	3,98	> 4,00	4,91	100%	Sangat tinggi

Visi/Misi	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2006	Target Capaian pada Tahun 2010	Realisasi Akhir Periode (2010)	Tingkat Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi
mengoptimalkan pengembangan kawasan ekonomi secara terpadu	Rupiah)					
	PDRB (ADHK) (Juta Rupiah)	1.710		5.894		
	PDRB Sektor Pertanian (ADHK) (Juta Rupiah)	554.751,42		658.633,27		
	PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	221.041,40		283.329,93		
Misi 3						
Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan ketahanan budaya	Tingkat kemiskinan (%)	12,34	5%	10,22%	-100%	Sangat rendah
	IPM (poin)	68,40	80	65,09	81,36%	Tinggi
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,50		7,43		
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,20		69,23		
Misi 4						
Mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana daerah, ekonomi, agama dan sosial budaya.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)			28,69%		
	Proporsi sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik (%)			50%		

Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 600.2.1/1570/SJ tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, skala nilai peringkat kinerja terbagi menjadi lima kriteria yaitu :

1. Sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$)
2. Tinggi ($76\% \leq 90\%$)
3. Sedang ($66\% \leq 75\%$)
4. Rendah ($51\% \leq 65\%$)
5. Sangat rendah ($\leq 50\%$)

Sesuai dengan kriteria diatas, maka berdasarkan tabel 2.....terdapat 5 indikator yang dapat diukur dengan asumsi menggunakan analisis target dalam RPJPD selama periode RPJMD 2006-2010. Sementara indikator lainnya teridentifikasi namun karena tidak mencantumkan target sehingga tidak dapat diukur capaian realisasi kinerjanya. Capaian indikator yang dapat diukur tersebut yaitu :

1. Pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK); opini WDP berada pada kriteria ke-2 dalam penilaian BPK maka penilaian realisasi kinerja WDP dianggap berada capaian 60% yang termasuk kriteria **rendah**.
2. Pertumbuhan ekonomi; kriteria penilaian realisasi kinerja pertumbuhan ekonomi adalah **sedang** (75,43%). Target yang ditetapkan dalam RPJPD diatas 7%, akan tetapi tahun 2010 ekonomi tumbuh pada kisaran 5,28%.
3. Tingkat kemiskinan; kriteria capaian indikator tingkat kemiskinan **sangat rendah**. Dalam RPJPD ditargetkan 5%, namun hingga tahun 2010 capaian menjadi 10,22%. Tingkat capaian kinerja kemiskinan diberi tanda minus (-), hal ini berarti bahwa indikator ini bersifat negatif (semakin kecil semakin baik) dan tidak mencapai target.
4. Indeks Pembangunan Manusia; capaian kinerja **tinggi** sebesar 81,36%.

Apabila dihitung rata-rata capaian kinerja pada RPJMD 2006-2010 dengan menggunakan indikator terukur yang tersedia maka rata-rata capaian 72,84% dengan predikat **“SEDANG”**.

2. Periodesasi RPJMD 2010 - 2015

Dalam periodesasi RPJMD 2010-2015, berdasarkan hasil evaluasi maka diperoleh capaian kinerja sasaran pokok sebagai berikut :

1. Terdapat 7 indikator yang berkinerja **sangat tinggi** yaitu ; PDRB Perkapita, Angka pengangguran, Jumlah kunjungan wisatawan lokal, jumlah kunjungan wisatawan wisman dan jumlah koperasi dan UMKM, pertumbuhan ekonomi, umur harapan hidup serta opini BPK
2. Terdapat 2 indikator yang berkinerja **tinggi** yaitu Tingkat kemiskinan dan Rata-rata lama sekolah.
3. Terdapat 1 indikator yang berkinerja **sedang** yaitu : Proporsi jaringan irigasi kondisi baik
4. Terdapat 1 indikator yang berkinerja **rendah** yaitu : Jalan kabupaten kondisi baik
5. Terdapat 1 indikator yang berkinerja **sangat rendah** yaitu : angka pengangguran

Dibandingkan dengan periode sebelumnya maka terjadi peningkatan rata-rata capaian kinerja pada pentahapan ini. Setelah dilakukan penghitungan terhadap rata-rata capaian kinerja periode 2010-2015 maka diperoleh nilai sebesar 88,03% dengan menyandang predikat **“TINGGI”**. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja selama periode 2010-2015 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.4. Evaluasi Pencapaian RPJMD Tahun 2010-2015
Kabupaten Pesisir Selatan

Visi/Misi	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2010	Target Capaian pada Tahun 2015	Realisasi Akhir Periode (2015)	Tingkat Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PESISIR SELATAN YANG SEJAHTERA”						
Misi 1						
Melanjutkan mengembangkan	PDRB Perkapita	10,74 juta	14,98 juta	22,849 juta	100%	Sangat tinggi

Visi/Misi	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2010	Target Capaian pada Tahun 2015	Realisasi Akhir Periode (2015)	Tingkat Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi
perekonomian local dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pengembangan Kawasan ekonomi secara terpadu	(ADHB)					
	Angka pengangguran	8,68%	8,21%	11,69%	-100%	Sangat rendah
	Tingkat kemiskinan	10,22%	8,77%	7,43%	84,72%	Tinggi
	Jumlah kunjungan wisatawan lokal	113.970 orang	207.862 orang	2 juta orang	100%	Sangat tinggi
	Jumlah kunjungan Wisman	533 orang	972 orang	1.600 orang	100%	Sangat tinggi
	Pembangunan pasar nagari	37 unit	45 unit			
	Jumlah koperasi dan UMKM	2.440 unit	1.200 unit	4.440 unit	100%	Sangat tinggi
	Jalan kabupaten kondisi baik	28,69%	64,27%	40%	62,24%	Rendah
	Jumlah daerah tertinggal	97 kampung	0 kampung			
	Proporsi jaringan irigasi kondisi baik	45%	70%	51,2%	73,14%	Sedang
Misi 2						
Melanjutkan pembangunan sumberdaya manusia yang Siap enghadapi tantangan dunia global	Pertumbuhan ekonomi	5,28%	7,09%	5,73%	100%	Sangat tinggi
	Rata-rata lama sekolah	7,84 tahun	9,4 tahun	8,11 tahun	86,28%	Tinggi
	Umur harapan hidup	68,40 tahun	70 tahun	69,96 tahun	99,94%	Sangat tinggi

Visi/Misi	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2010	Target Capaian pada Tahun 2015	Realisasi Akhir Periode (2015)	Tingkat Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi
	Angka kematian ibu	109 jiwa	109 jiwa			
Misi 3						
Revitalisasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat	Penerapan Sistem SIAK	3 kecamatan (IV Jurai, Bayang, Koto XI Tarusan)	SIAK berlaku di 15 kecamatan			
	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	Sangat tinggi

3. Periodesasi RPJMD 2016 - 2021

Capaian kinerja pada pentahapan ketiga dari RPJPD 2005-2025 yakni RPJMD 2016-2021 terdapat 14 indikator yang dapat diukur dengan ketersediaan data yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Predikat **sangat tinggi** terdapat 11 indikator.
2. Indikator berkinerja **tinggi** terdapat 1 indikator
3. Indikator berkinerja **sangat rendah** terdapat 2 indikator

Capaian kinerja sangat tinggi pada umumnya berada dalam Misi 1. Sementara dalam misi 2 sampai misi 5 banyak capaian kinerja tidak ditemukan data capaiannya. Hal ini disebabkan tahun 2021 merupakan masa peralihan kepemimpinan kepala daerah. Tahun ini sudah dimulai penyusunan RPJMD periode berikutnya dengan menggunakan indikator-indikator yang sebagian baru. Adapun hasil evaluasi RPJMD 2016-2021 yang dilakukan pada pertengahan periode RPJMD 2016-2021 dengan menggunakan data capaian terakhir tahun 2019. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja pada tahapan ini adalah 87,27% dengan predikat **“TINGGI”**. Capaian kinerja per Misi dalam tahapan ini dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5. Evaluasi Pencapaian RPJMD Tahun 2016-2021
Kabupaten Pesisir Selatan

Visi/Misi	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Capaian pada Tahun 2021	Realisasi Akhir Periode (2021)	Tingkat Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA						
Misi 1						
Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Penilaian LKD (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	100%	Sangat tinggi
	Peningkatan penilaian Laporan akuntabilitas instansi pemerintah	CC	A	B (66,88)	80%	Tinggi
	Peningkatan Nilai LPPD	3037	3350	3209	95,79%	Sangat tinggi
	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	100%	Sangat tinggi
	Umur Harapan Hidup	70,11	70,6	70,96	100%	Sangat tinggi
	Rata-rata lama sekolah	8,37	8,52	8,27	97,06%	Sangat tinggi
	Harapan lama sekolah	13,34	13,64	13,33	97,72%	Sangat tinggi
Misi 2						
Meningkatkan pembangunan infrastruktur	Jalan kabupaten dengan kondisi baik	24,90	30,90	30,78	99,61%	Sangat tinggi

Visi/Misi	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Capaian pada Tahun 2021	Realisasi Akhir Periode (2021)	Tingkat Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA						
perekonomian dan infrastruktur social yang terkait dengan setor unggulan daerah						
	Irigasi kondisi baik	47,14	59,72	59,50	99,63%	Sangat tinggi
	Rasio elektrifikasi		100			
	Akses sanitasi layak	63,76	75,29	76,06	100%	Sangat tinggi
Misi 3						
Meningkatkan kehidupan Beragama yang rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya ABS-SBK	Persentase masjid yang memiliki TPQ aktif		80			
	Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya		80			
	Jumlah kekayaan budaya yang dilestarikan					
Misi 4						
Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan	- Peningkatan produksi utama : a. Padi	270.231	345.983	146.141	42,24%	Sangat rendah

Visi/Misi	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Capaian pada Tahun 2021	Realisasi Akhir Periode (2021)	Tingkat Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA						
berkelanjutan						
	b. Jagung	158.160	137.941	189.636	100%	Sangat tinggi
	c. Daging	1.340.616	1.397.267			
	d. Telur		1.784.756			
	e. Ikan		51.000			
	Skor pola pangan harapan	72,9	83	81,7	98,43%	Sangat tinggi
	Jumlah sentra industry		18			
	Jumlah sentra perdagangan		15			
	Jumlah koperasi aktif yang melakukan RAT		80			
	Jumlah UMKM		5.000			
	Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara (wisnu)	1.980.000	3.000.000	344.247	11,47%	Sangat rendah
	Wisatawan Mancanegara (Wisman)	1.667	2.000			
Misi 5						
Meningkatkan Peran Struktur Sosial dalam rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat-obatan terlarang	- Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)					
	Kasus narkoba		< 8,03			
	Angka kriminalitas		< 6,77			

Visi/Misi	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2016	Target Capaian pada Tahun 2021	Realisasi Akhir Periode (2021)	Tingkat Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA						
	Jumlah kasus prostitusi		<19,70			
	Organisasi kelembagaan kemasyarakatan yang aktif		80	100	100%	

4. Periodesasi RPJMD 2021 - 2026

RPJMD 2021-2026 merupakan periode terakhir dari pentahapan RPJPD 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan. Tahap ini masih sedang berjalan, namun akan tetap dilakukan evaluasi agar dapat menjadi sebagian data dukung kondisi terakhir yang akan digunakan dalam penyusunan RPJPD berikutnya. Tabel 2.6 memperlihatkan hasil evaluasi RPJMD 2021-2026.

Tabel 2.6. Evaluasi Pencapaian RPJMD Tahun 2021-2026
Kabupaten Pesisir Selatan

Visi/Misi	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Capaian pada Tahun 2026	Realisasi Akhir Periode (2026)	Tingkat Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi
VISI : MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL						
Misi 1						
Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	100%	Sangat tinggi
	Opini BPK terhadap Laporan	CC	A	B (66,88)	80%	Tinggi

Visi/Misi	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Capaian pada Tahun 2026	Realisasi Akhir Periode (2026)	Tingkat Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi
VISI : MEWUJUDKAN PESIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL						
	Pengelolaan Keuangan Daerah,					
	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP),	66,68 (B)	78 (BB)	68,97	88,42%	Tinggi
	Skor Nilai LPPD	3.200	3.240	31.433	100%	Sangat tinggi
	Level Maturitas SPIP	3 (3,0057)	3 (3,2)	30.000	100%	Sangat tinggi
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,34	3,4	3,48	100%	Sangat tinggi
	Indeks Profesionalitas ASN					
	Indeks Inovasi Daerah	56	61,03	49,93	81,81%	Tinggi
	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	85	82,65	97,23%	Sangat tinggi
	Keterbukaan Informasi Publik	92 (Informatif)	98 (Informatif)	99,92	100%	Sangat tinggi
Misi 2						
Meningkatkan Kualitas Hidup dan Masyarakat	Usia harapan hidup	70,86 tahun	71,9 tahun	71,25 tahun	99,09%	Sangat tinggi
	Angka	8	10	9	90%	Tinggi

Visi/Misi	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Capaian pada Tahun 2026	Realisasi Akhir Periode (2026)	Tingkat Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi
VISI : MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL						
	Kematian Bayi					
	Angka Kematian Ibu	105	125	144	-100%	Sangat rendah
	Angka Kesakitan	16,57%	14,84%			
	Prevalensi stunting	11,88%	10,8%	7%	100%	Sangat tinggi
	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	73,4%	100%	79%	79%	Tinggi
	Tingkat Kemiskinan	7,61%	6,25%	7,11%	-100%	Sangat rendah
	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	51,90%	56,05%	66,21%	100%	Sangat tinggi
	Pencapaian skor pola pangan harapan	86,4%	87%	80,4%	92,41%	Sangat tinggi
	Pengeluaran perkapita	9.212.000 (ribu rupiah)	9.949.000 (ribu rupiah)	9.686.000 (ribu rupiah)	97,35%	Sangat tinggi
Misi 3						
Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	nilai PDRB	Rp. 9.470 Triliun	Rp11,923 triliun	9.686	81,24%	Tinggi
	Indeks Gini	0,249	0,25	0,246	98,4%	Sangat tinggi

Visi/Misi	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Capaian pada Tahun 2026	Realisasi Akhir Periode (2026)	Tingkat Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi
VISI : MEWUJUDKAN PESIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL						
	Nilai investasi swasta dan masyarakat	N/A	Rp 2,75 Trilyun	679,234	24,96%	Sangat rendah
	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Rp. 3,49 Triliun	Rp. 4,1 Trilyun	3.74	91,21%	Sangat tinggi
	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp. 703,61 Triliun	Rp.787 Milyar	741.26	94,15%	Sangat tinggi
	Tingkat pengangguran terbuka	7,00%	4,95%	4,61%	93,13%	Sangat tinggi
	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	29,55%	48%	32,34	67,37%	Sedang
	Rasio Konektivitas	54%	0,59%	58%	100%	Sangat tinggi
	Proposi Lahan Sawah Beririgasi Baik	57,05%	66,70%	59,49%	89,19%	Tinggi
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	86,74%	73,69%	77,94%	100%	Sangat tinggi
Misi 4						
Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Wisata Nyaman Berkesan dan Tujuan yang	Jumlah Serapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	N/A	7.200 orang	5.200 orang	72,22%	Sedang
	Jumlah kunjungan wisatawan	177.283 Orang	1.700.000 Orang	942.240	55,42%	Rendah

Visi/Misi	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Capaian pada Tahun 2026	Realisasi Akhir Periode (2026)	Tingkat Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi
VISI : MEWUJUDKAN PESIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL						
	(nusantara dan asing)					
	Lama tinggal wisatawan	1,1 hari	1,5 hari	1,25	83,33%	Tinggi
	Nilai omset usaha ekonomi kreatif	N/A	Rp. 35 Milyar	16	45,71%	Sangat rendah
Misi 5						
Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	Harapan Lama Sekolah	13,32 Tahun	13,57 Tahun	13,35 Tahun	98,38%	Sangat tinggi
	Rata-Rata Lama Sekolah,	8,26 Tahun	8,43 Tahun	8,43 Tahun	100%	Sangat tinggi
	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	N/A	14 orang (Pendidik 6 Siswa 8)	2	14,28%	Sangat rendah
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	3,4471	10,682	7,172	67,14%	Sedang
	Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM	Tinggi (3,125)	Sangat Tinggi (3,800)			
	Tingkat partisipasi	N/A	Tinggi (≥21	Tinggi (≥35	100%	Sangat tinggi

Visi/Misi	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Capaian pada Tahun 2026	Realisasi Akhir Periode (2026)	Tingkat Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi
VISI : MEWUJUDKAN PESIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL						
	subuh berjamaah di mesjid dan mushala,		orang)	Orang)		
	Persentase masyarakat membayar zakat harta,	96,38%	100%	75,5%	75,5%	Sedang
	Jumlah prestasi pemuda tingkat provinsi dan nasional	N/A	33 orang (nasional 13 provinsi 20)	17	51,51%	Rendah
	Jumlah wirausahawan yang berdaya saing terus berkembang	N/A	1300	656	50,46%	Sangat rendah
Misi 6						
Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis	Indek Kebahagiaan	N/A	75,92.	71,34	93,97%	Sangat tinggi
	Proporsi temuan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan	0,0009%	0,0006 %	0,0058	100%	Sangat tinggi
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	99,8828%	94,0788%	917,179	100%	Sangat tinggi

Visi/Misi	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Capaian pada Tahun 2026	Realisasi Akhir Periode (2026)	Tingkat Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi
VISI : MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL						
	Jumlah Nagari tangguh bencana	N/A	Pratama (127)	Pratama (47) Madya (2) Utama (5)	37%	Sangat rendah
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	56,93	56,93	53,39	93,78%	Sangat tinggi

Hasil evaluasi menunjukkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja sangat tinggi terdapat 23 indikator
2. Capaian kinerja tinggi terdapat 8 indikator
3. Capaian kinerja sedang terdapat 4 indikator
4. Capaian kinerja rendah terdapat 2 indikator
5. Capaian kinerja sangat rendah 6 terdapat 6 indikator

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja pada periode 2021-2025 berpredikat **“TINGGI”** dengan nilai 86,66%.

2.2.2. Capaian Indikator Makro Pembangunan Jangka Panjang

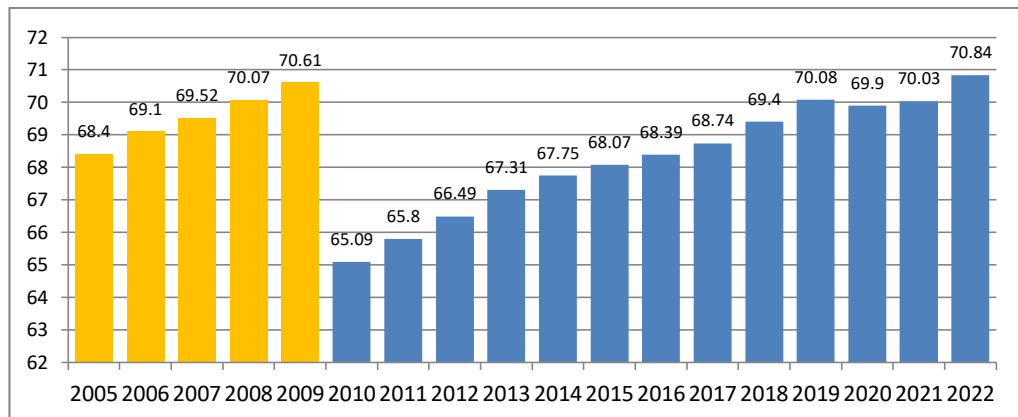
Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu saja untuk mengukur keberhasilan pembangunan tersebut diukur melalui indikator pembangunan diantaranya indikator makro. Indikator ini dapat digunakan untuk menganalisis capaian pembangunan ekonomi daerah dan dapat menilai sejauh mana realisasi pembangunan dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dengan asumsi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan.

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk melihat capaian pembangunan manusia antar wilayah dan antar waktu. Indeks ini diukur melalui tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu dimensi kesehatan yang diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH); dimensi pendidikan yang diukur dengan Rata-Rata Lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); dan dimensi ekonomi melalui pengeluaran perkapita.

Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif mengalami perbaikan dalam kurun waktu 2005-2022. Apabila diamati perkembangan IPM Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dalam Gambar 2.2. Mulai Tahun 2010 penghitungan IPM menggunakan metode baru sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan metode lama. Terjadi perubahan metode perhitungan agregasi IPM dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Metode baru menambahkan Harapan lama Sekolah dalam dimensi pendidikan dalam penghitungannya.

Gambar 2.2. Indek Pembangunan Manusia Kab. Pesisir Selatan, 2005-2022

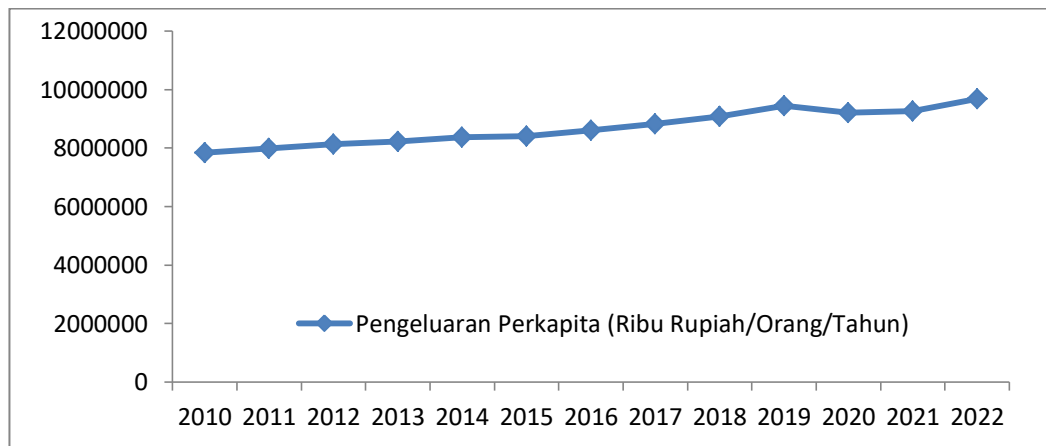


Sumber : BPS, 2023

Capaian IPM Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang tahun 2010-2022 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Dengan rata-rata pertumbuhan 0,7% per tahun tentunya hal

ini harus terus ditingkatkan agar kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pesisir Selatan memiliki daya saing tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga secara regional bahkan internasional. Apabila dilihat dari komponen pembentuk IPM tampak bahwa ketiga komponen menunjukkan tren yang juga meningkat. Peningkatan komponen ekonomi yakni pengeluaran perkapita disesuaikan menunjukkan laju pertumbuhan paling besar 1,77%. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan dan kemampuan daya beli masyarakat. Namun harus tetap diwaspadai bahwa peningkatan pengeluaran tidak selalu mencerminkan peningkatan pendapatan disebabkan adanya sumber selain pendapatan untuk melakukan pengeluaran, diantaranya dari asset atau warisan serta hutang.

Gambar 2.3. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kab. Pesisir Selatan, 2010-2022

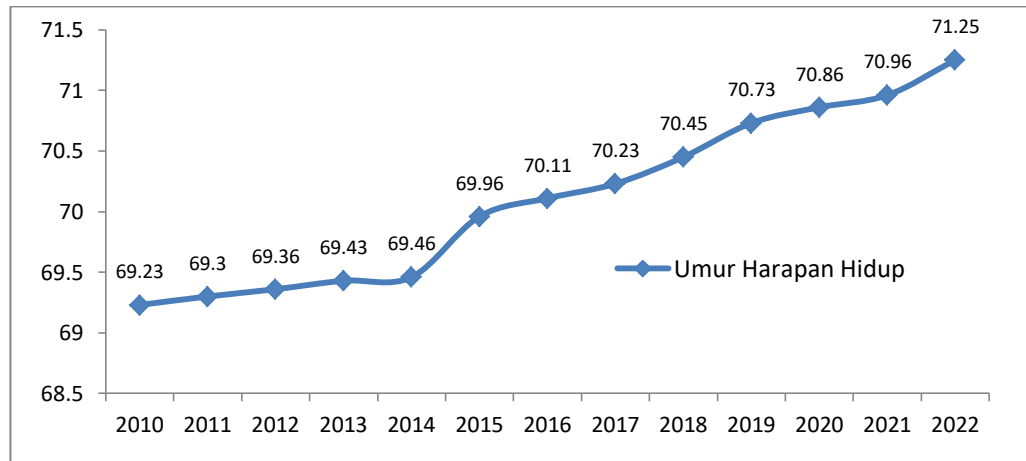


Sumber : BPS, 2023

Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) memiliki rata-rata pertumbuhan 0,24% per tahun. Hal ini mengindikasikan masih diperlukannya peningkatan kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu indikator kesehatan sebagai salah satu variabel terhadap UHH adalah angka kesakitan (morbiditas). Angka morbiditas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebesar 25,41%

merupakan paling tinggi di Sumatera Barat. Hal ini perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah ke depan.

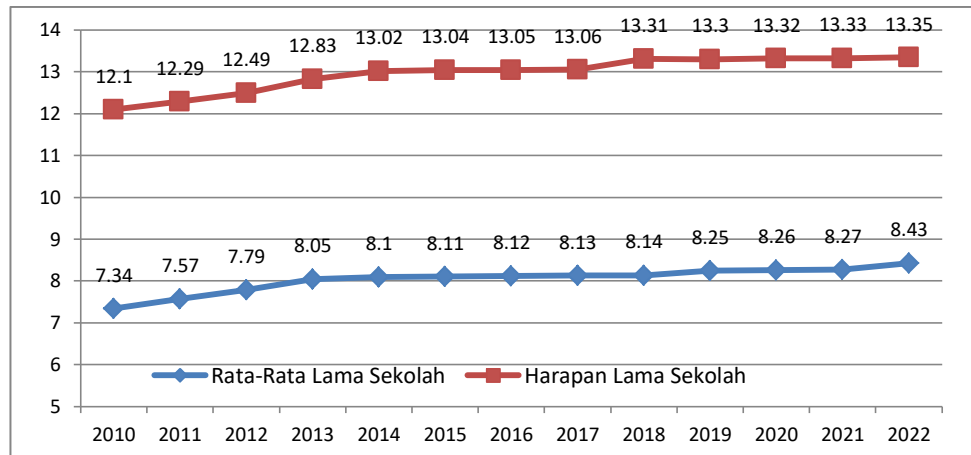
Gambar 2.4. Perkembangan Umur Harapan Hidup Kab. Pesisir Selatan, 2010-2022



Sumber : BPS, 2023

Indikator Pendidikan yang diukur melalui Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah juga menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan berturut-turut 1,15% dan 0,82%. Hal demikian ini mengindikasikan bahwa ke depannya kualitas pendidikan penduduk akan semakin membaik. Tentu saja diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Tidak hanya untuk memenuhi standar minimal pelayanan akan tetapi benar-benar memberikan akses yang adil dan merata bagi semua penduduk untuk dapat memasuki jenjang pendidikan hingga tingkat tertinggi. Hal ini juga menjadi amanat yang harus di capai dalam TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang merupakan kesepakatan dunia. Berikut Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan selama 2010-2022.

Gambar 2.5. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan selama 2010-2022.



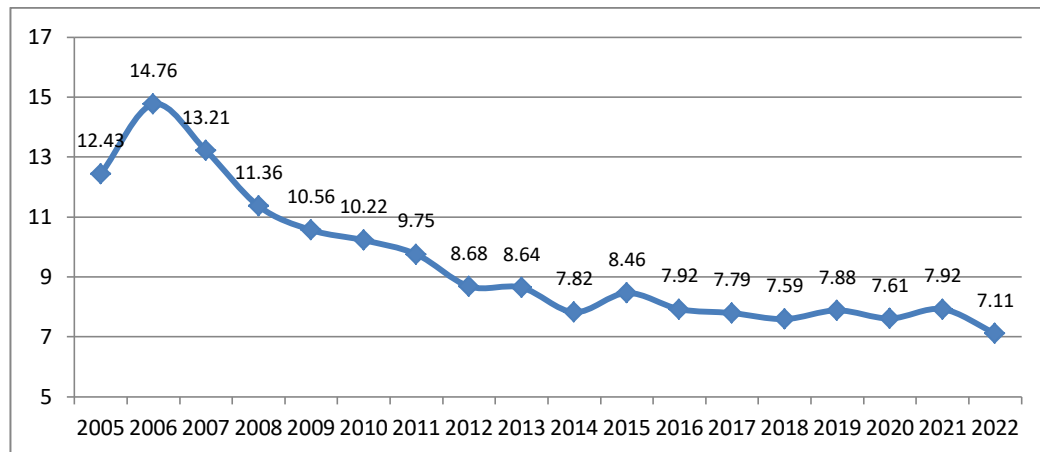
Sumber : BPS, 2023

2.2.2.2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan, apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Dalam mengukur tingkat kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskina, dimana Garis kemiskinan dapat dibedakan atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tren penurunan dalam 2 dekade terakhir. Awal periode RPJPD di tahun 2005 angka kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 12,43%, meningkat cukup tajam pada tahun 2006 sebesar 14,76%. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut terjadi kenaikan BBM hingga 100% serta kenaikan harga kebutuhan pokok. Kondisi ini sangat berdampak terhadap beban pengeluaran masyarakat. Memasuki tahapan kedua RPJPD, mulai tahun 2011 tingkat kemiskinan sudah berada pada angka satu digit. Tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan selama 2005-2022 digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.6. Tingkat Kemiskinan Kab. Pesisir Selatan, 2005-2022

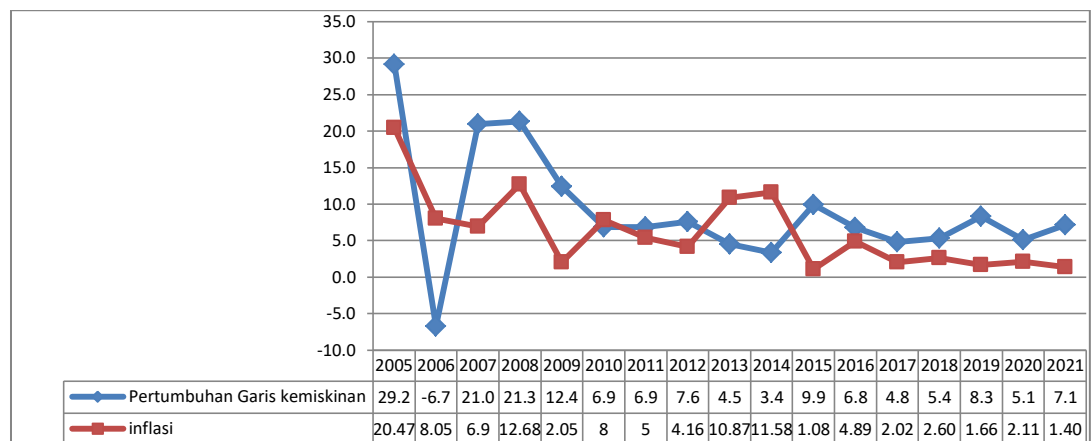


Sumber : BPS, 2023

Meskipun terjadi penurunan kemiskinan setiap tahunnya, namun penurunan ini mengalami perlambatan. Faktor harga sangat berpengaruh terhadap elastisitas kemiskinan. Tingkat perubahan harga yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mempunyai kaitan erat dengan kemampuan daya beli masyarakat. Semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya beli. Perlambatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya disebabkan karena perubahan garis kemiskinan lebih tinggi dari tingkat inflasi (dengan mengacu tingkat inflasi Sumatera Barat). Garis berwarna biru dalam Gambar 2.3 merupakan perubahan

garis kemiskinan setiap tahun, sementara garis berwarna merah menunjukkan tingkat inflasi tahunan. Sepanjang periode RPJPD, rata-rata tingkat perubahan garis kemiskinan berada diatas tingkat inflasi, artinya faktor harga komoditi bahan makanan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Untuk Lebih jelasnya perbandingan tingkat perubahan (pertumbuhan) garis kemiskinan dengan tingkat inflasi digambarkan berikut ini.

Gambar 2.7. Pertumbuhan Garis Kemiskinan dan perkembangan Inflasi
Kab. Pesisir Selatan, 2005-2022



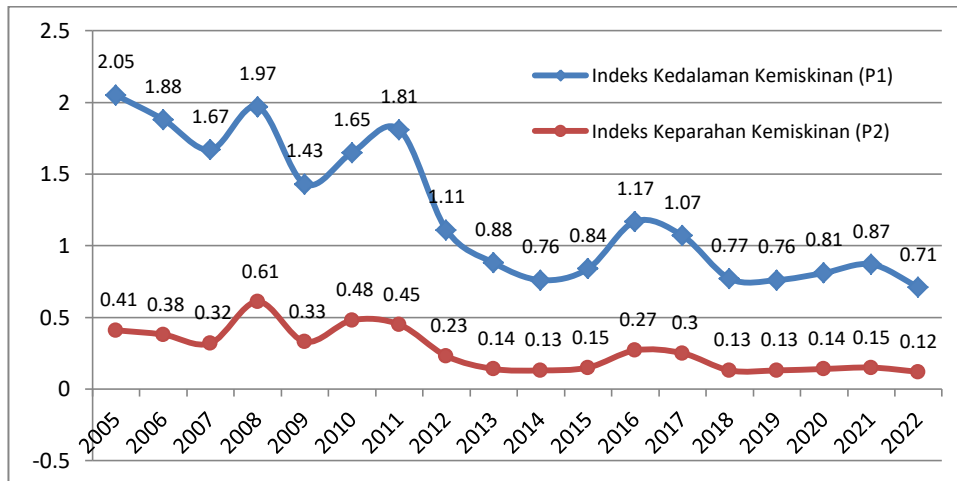
Sumber : BPS dan data olahan, 2023

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Gambar di bawah memperlihatkan kondisi perkembangan nilai indeks P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan) dan P2 (Indeks Keparahannya Kemiskinan), dimana indeks P1 adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks P2 memberikan informasi mengenai

gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 2.8. Pertumbuhan Indeks P1 dan P2 Kab. Pesisir Selatan, 2005-2022



Sumber : BPS, 2023

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan cenderung fluktuatif. Hal ini memperlihatkan ketidakstabilan kondisi masyarakat miskin di Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga sangat rentan terhadap adanya gangguan atau shock dalam perekonomian khususnya dan sosial kemasyarakatan pada umumnya. Berbagai strategi pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dimana strategi ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan budaya usaha. Selain itu penduduk miskin tentunya diharapkan juga mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh diantaranya adalah

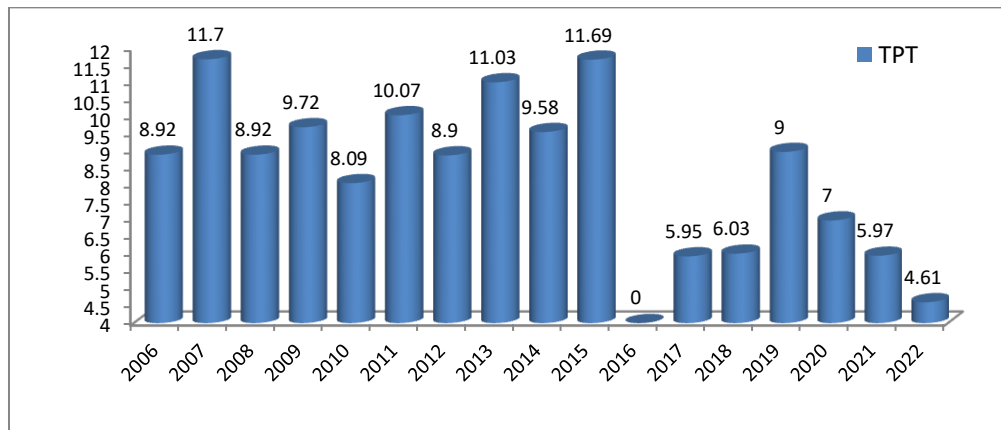
dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau berhemat.

2.2.2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sementara angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Adapun yang tergolong Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Indikator ini menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis, teknologi, dan lain-lain.

Gambar 2.9. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kab. Pesisir Selatan, 2006-2022



Sumber : BPS, 2023

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2006-2022 cenderung fluktuatif. Tahun 2015 merupakan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi yaitu 11,69%. Sementara pada tahun 2016 tidak dapat dikeluarkan data Pengangguran karena pada tahun tersebut pendataan Survey Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) tidak dilaksanakan. Selanjutnya rata-rata lapangan pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh penduduk Kabupaten Pesisir Selatan adalah sektor pertanian; perdagangan, hotel dan restoran; dan jasa.

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, tampak bahwa pengangguran terbuka didominasi oleh penduduk tamatan SMA. Tahun 2021 pengangguran yang tamatan SMA sebanyak 54,79%, turun di tahun 2022 menjadi 46,12%. Hal ini disebabkan diantaranya faktor ketersediaan lapangan kerja yang cenderung banyak pada sektor informal di Kabupaten Pesisir Selatan serta memilih-milih dalam mendapatkan pekerjaan.

Tabel 2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kab. Pesisir Selatan, 2021-2022

Tingkat Pendidikan	2021	%	2022	%
≤ Sekolah Dasar	1386	10,25	2563	24,17
Sekolah Menengah Pertama	2530	18,72	2653	25,02
Sekolah Menengah Atas	7405	54,79	4890	46,12
Perguruan Tinggi	2195	16,24	496	4,68
Total	13516	100	10602	100

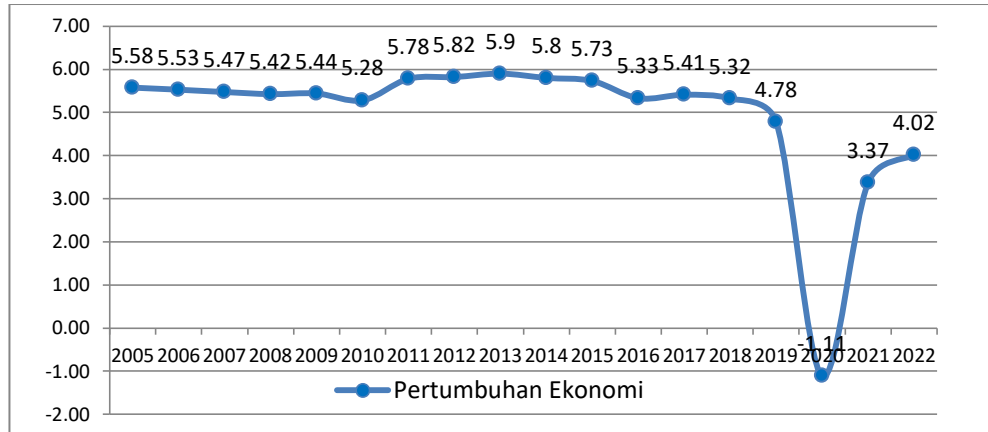
Sumber PSDA, 2022; 2023

2.2.2.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang positif merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Sepanjang 2005-2022 tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir selatan mengalami penurunan sebesar -27,96%. Tahun 2020 Perekonomian mengalami kontraksi sebesar -1,11% sebagai akibat dari terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia internasional. Namun kondisi ini tidak membuat Kabupaten Pesisir Selatan berlama-lama berada dalam keterpurukan. Tahun 2021 perekonomian mulai bangkit dan membaik tumbuh hingga 3,37%. Capaian tertinggi kinerja perekonomian berada pada tahun 2013, dimana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,9%. Apabila dilihat dari tren perkembangannya tampak bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Hal ini perlu jadi perhatian bagi pemerintah daerah sehingga ke depan perlu perumusan kebijakan ekonomi yang benar-benar dapat mendorong percepatan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan selama 2005-2022 seperti Gambar berikut ini.

Gambar 2.10. Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pesisir Selatan, 2005-2022



Sumber : BPS, 2023

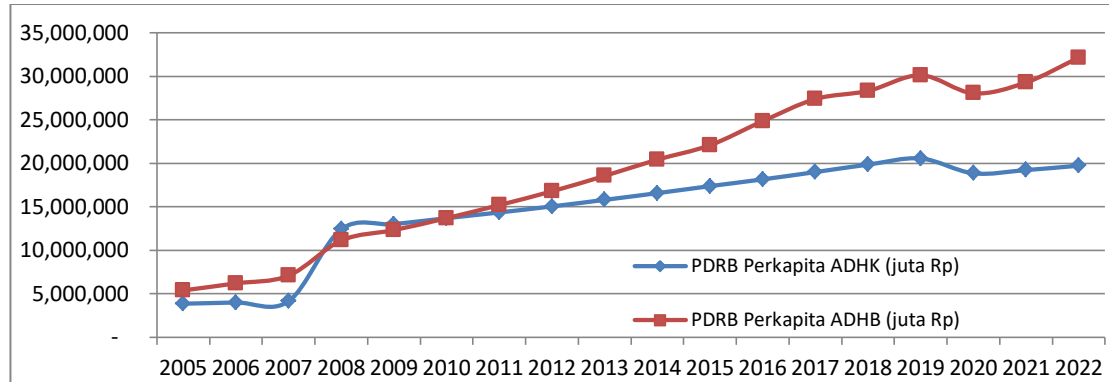
2.2.2.5. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara atau daerah. Pendapatan perkapita adalah total penghasilan negara atau daerah dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga

nilainya mencerminkan pendapatan rata-rata penduduk negara atau daerah tersebut. Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita suatu negara atau daerah, akan mencerminkan semakin sejahtera masyarakat negara atau daerah yang bersangkutan

Perkembangan nilai pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang periode 2005-2022 terlihat adanya kecenderungan peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,10% untuk nilai berdasarkan harga konstan dan 0,11% untuk nilai berdasarkan harga berlaku. Hal ini mengartikan bahwa terjadi gap atau kesenjangan antara pendapatan perkapita nominal dengan pendapatan perkapita riil semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan riil melaju lebih lambat dibandingkan pendapatan nominal yang mengandung unsur inflasi. Tentu saja akibatnya tingkat daya beli dan kesejahteraan masyarakat pun bertumbuh lebih lambat.

Gambar 2.11. Perkembangan Pendapatan Perkapita Kab. Pesisir Selatan, 2005-2022



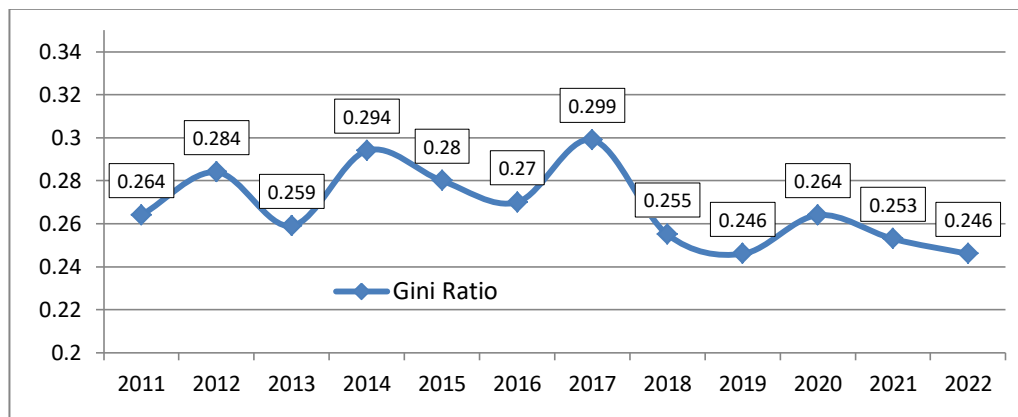
Sumber : BPS, 2023

2.2.2.6. Ketimpangan Pendapatan (Gini ratio)

Salah satu metode untuk mengukur pemerataan pendapatan adalah Gini Ratio. Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi/mendekati angka satu, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Perkembangan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2011 sampai tahun 2022 memperlihatkan kecenderungan berfluktuasi namun semakin mengalami perbaikan. Ketimpangan tertinggi terjadi tahun 2017 sebesar 0,299, namun setelahnya semakin membaik yang berarti tingkat pendapatan antara yang berpendapatan tinggi dan rendah semakin mendekat dan merata.

Gambar 2.12. Perkembangan Gini Ratio Kab. Pesisir Selatan, 2005-2022



Sumber : BPS, 2023

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Pembangunan merupakan suatu upaya perubahan, berdasarkan pilihan posisi tertentu yang tidak lepas dari pengalaman (sejarah), realitas situasi dan kepentingan para pihak yang mengambil keputusan pembangunan. Tujuan utama pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan, perhatian dan partisipasi masyarakat dalam segala hal.

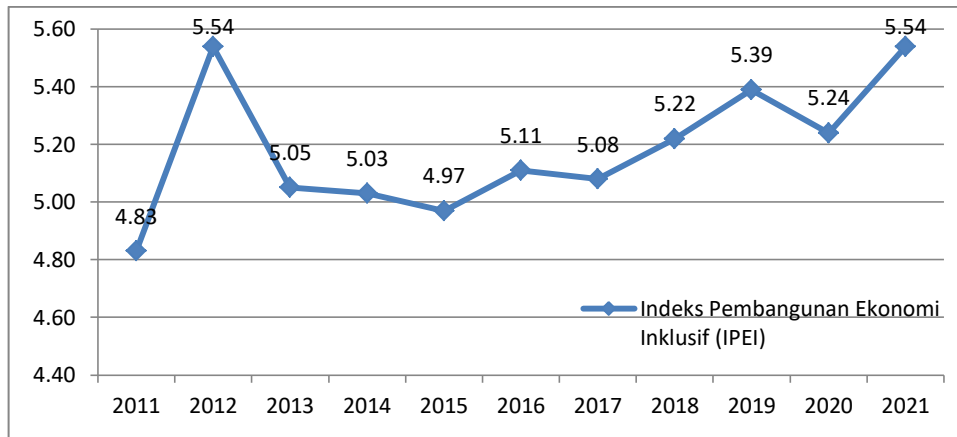
Masalah pembangunan harus ditegaskan bahwa pembangunan suatu Negara harus mampu mengatasi tiga persoalan mendasar yaitu masalah kemiskinan, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang mencerminkan perubahan struktur masyarakat secara keseluruhan baik itu struktur nasional, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional. Perubahan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan dan memberantas kemiskinan sehingga diharapkan terwujudnya kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual. Dalam upaya pengembangan ekonomi daerah, terdapat 3 (tiga) permasalahan keterbatasan yaitu:

1. Keterbatasan kapasitas; mencakup keterbatasan kapasitas SDM, Sumbardaya Modal, keterbatasan akses dan keterbatasan menghadapi perubahan yang cepat.
2. Keterbatasan daya saing daerah; meliputi keterbatasan promosi daerah, keterbatasan keterkaitan antar daerah,
3. keterbatasan pengembangan iklim usaha dan investasi serta keterbatasan kualitas komoditas

Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar kelompok masyarakat dan antar daerah maka pemerintah Indonesia melalui Bappenas merumuskan tentang Pembangunan Ekonomi Inklusif, yang bermakna sebagai pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara

berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Untuk itu Bappenas mengukurnya dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Adapun skala nilai IPEI bergerak dari 1-19; dimana Skala:1-3 kurang memuaskan, 4-7 memuaskan, 8-10 sangat memuaskan.

Gambar 3.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Kab. Pesisir Selatan, 2005-2022



Sumber : <http://inklusif.bappenas.go.id/data>; 2022

Gambar 3.1 menunjukkan tingkat inklusivitas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian tertinggi terjadi di tahun 2012 yakni pada tahapan ke-2 RPJPD dengan nilai 5,54 (memuaskan). Selanjutnya perjalanan IPEI berfluktuatif dan kembali di tahun 2021 memperoleh nilai yang sama dengan tahun 2011 yang notabene berada pada tahapan ke-3 RPJPD. Berdasarkan data ini ke depan dalam upaya untuk meningkatkan inklusivitas

pembangunan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu perluasan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

3.1. Faktor-Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD

Secara teoritis, beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan keberhasilan pembangunan antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, permodalan dan akumulasi modal, tenaga manajerial dan organisasi produksi, kemajuan dan pemanfaatan teknologi. Salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia bisa menjadi faktor pendukung dan juga bisa menjadi faktor penghambat pembangunan suatu daerah. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang dicerminkan oleh jumlah penduduk di suatu daerah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika kenaikan jumlah penduduk tidak dikelola dengan efektif dan efisien maka akan berakibat pada tingginya beban ketergantungan (dependency ratio) penduduk, yang pada akhirnya akan menjadi beban pembangunan daerah.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah **“Pesisir Selatan yang maju dan sejahtera dengan basis ekonomi pangan dan pariwisata”**, maka terdapat beberapa faktor-faktor yang mendorong ketercapaian kinerja yaitu :

1. Komitmen dan integritas pimpinan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, partisipatif, transparan dan akuntabel
2. Pemanfaatan aset-aset daerah dan memperbaiki prosedur keuangan. Perbaikan Sistem keuangan bersamaan dengan penataan kelembagaan birokrasi daerah
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi
4. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
5. Pemanfaatan media sosial dan media cetak dalam promosi kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan
6. Peran serta masyarakat dalam pembangunan yang cukup tinggi untuk mengelola potensi-potensi lokal

Faktor lainnya yang mendukung ketercapaian pembangunan daerah adalah adanya konsistensi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah serta dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat secara kelembagaan dan keuangan.

3.2. Faktor-Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD

Sebagaimana faktor pendukung, maka faktor penghambat pembangunan juga dapat bersumber dari faktor ekonomi dan non ekonomi. Berdasarkan analisis yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pencapaian kinerja RPJPD adalah :

1. Rendahnya efisiensi dan efektifitas serta produktivitas pegawai negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Perencanaan pegawai yang belum sesuai dengan klasifikasi jabatan dan analisis beban kerja
3. Infrastruktur dasar dan infrasturktur ekonomi yang belum memadai
4. Masih rendahnya pemanfaatan dan eksplorasi potensi-potensi unggulan daerah
5. Daya saing sumber daya manusia daerah yang masih rendah
6. Belum terintegrasinya
7. Masih kurangnya inovasi dalam intensifikasi dan diversifikasi produk perikanan yang dihasilkan
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara, menjaga dan memanfaatkan potensi wisata
9. Masih terbatasnya SDM kepariwisataan
10. Pengembangan sektor pertanian yang belum diarahkan ke sistem agribisnis
11. Belum adanya sinkronisasi hulu dan hilir terhadap sektor unggulan daerah

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

4.1. Kesimpulan

Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2005-2025 menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan selama 20 (dua puluh tahun) yang mencakup capaian indikator kinerja makro pembangunan dan arah kebijakan pembangunan daerah secara rata-rata berkinerja **Baik**. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa parameter indikator makro Pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia memperlihatkan bahwa pada awal periode Tahun 2005 dengan nilai indeks 68,40 mengalami pertumbuhan 3,57 % menjadi 70,84 pada tahun 2022, Angka Kemiskinan pada akhir periode sebesar 7,11% mengalami peningkatan 42,79% dari kondisi awal sebesar 12,43%. Sementara itu Angka Pengangguran dan ketimpangan pendapatan juga mengalami peningkatan, dimana angka pengangguran menurun 78,49% dari kondisi awal perencanaan pada posisi angka 21,43% menjadi 4,61%. Selanjutnya diikuti oleh PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita berkinerja sangat baik mencapai 100%. Akan tetapi Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan dari kondisi awal perencanaan 5,58% menjadi 4,02%.

4.2. Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005 sampai dengan akhir periode Tahun 2022 direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan pengolahan informasi dan data perencanaan pembangunan daerah berbasis data SIPD, terutama validasi dan reliabilitas data. Hal ini penting karena terkait dengan pengukuran target dan realisasi indikator kinerja utama dan indikator kunci pembangunan daerah. - Sumber data antara lain dapat berupa data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi, atau kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh Perangkat Daerah secara berkesinambungan. Selain itu juga dapat digunakan data sekunder yang

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat maupun daerah dan instansi pemerintah, hasil riset/audit/studi oleh lembaga yang kompeten dibidangnya. dukungan data dan informasi terkini yang dipercaya akan membantu daerah menyusun dan menetapkan arah kebijakan dan sasaran pokok yang lebih tepat, sehingga dapat digunakan untuk membagi periode pencapaiannya dalam pembangunan lima tahunan. Hal itu juga akan dapat membantu penetapan indikator dan target kinerja yang lebih baik

2. Perlu arah yang fokus pada aspek daya saing daerah antara lain dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas atau infrastruktur wilayah yang mendukung untuk kehidupan sehat dan sejahtera, iklim investasi, dan yang paling penting adalah kualitas sumber daya manusia. Artinya daya saing bukan hanya dari kriteria fisik saja, tetapi sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia melalui produktivitas kerja yang makin meningkat
3. Dalam penyusunan dokumen RPJPD ke depan, perlu memperhatikan aspek ketercapaian perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi dan keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan target indikator capaian melalui cascading sasaran dan indikator terhadap perencanaan pembangunan.
4. Indikator pembangunan jangka panjang juga perlu dibangun karena akan sangat menentukan dalam mengukur keberhasilan pembangunan jangka panjang.
5. Sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi situasi ketidakpastian pada masa pelaksanaan RPJPD periode selanjutnya, perlu diimplementasikan upaya mitigasi risiko perencanaan yang mampu memberikan petunjuk dalam menanggulangi dan meminimalisir dampak risiko agar ketercapaian target pembangunan tetap terjaga sesuai dengan rencana atau *on-track*
6. Sebagai tindak lanjut setelah tersusunnya dokumen RPJPD, perlu disusun pentahapan pembangunan lima tahunan yang adaptif, dan berkesinambungan antar setiap tahap pembangunan
7. Perlu ada mekanisme penyesuaian pada setiap periode pelaksanaan atas dokumen perencanaan (jangka panjang/menengah/tahunan) mengingat perkembangan yang sangat dinamis maupun adanya situasi tidak terduga seperti pandemi dan isu yang berkembang.

8. Hasil evaluasi RPJPD diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para Calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, program serta arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2030 agar selaras dengan RPJMD 2025-2030 dan sebagai salah satu pedoman dalam merumuskan rancangan awal RPJPD 2025-2045.

Diharapkan dengan selesainya dokumen ini, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dua puluh tahun kedepan akan menjadi lebih baik dan terencana dengan matang. Hal-hal yang belum terakomodasi dalam laporan ini tentu memberi kesempatan untuk kembali membuka diskusi dan melanjutkan analisis, karena perencanaan memang tidak seharusnya berhenti ketika dokumennya selesai. Demikian Laporan Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini disusun, dengan harapan dapat dimanfaatkan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah periode Tahun 2025-2045. Semoga bermanfaat untuk kebaikan bersama.



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2023**